

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua ini diresmikan oleh beberapa pihak pemerintah Banjarbaru kepada Kampung Pengolah Jamu Loktabat (Pejabat), yang mana setiap daerah yang diresmikan memiliki ciri khas yaitu dengan memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Program ini merupakan sebuah bentuk pertahanan masyarakat di kehidupan sehari-hari yang tidak hanya terfokus kepada kebutuhan hidup yang harus terpenuhi.

Namun juga yang menjadi penting dalam hal keamanan dan pengamanan masyarakat kemudian juga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk dapat memiliki pola pikir yang inovatif sehingga mengarah kepada kemajuan. Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua ini menjadikan masyarakatnya mempunyai tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya dalam hal Kesehatan, khususnya di Era Pasca pandemi Covid-19 saat ini.

Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua ini merupakan wujud adanya kolaborasi pemerintah dengan masyarakat Kampung Pengolah Jamu Loktabat (Pejabat). Diharapkan akan terus terjaga dalam jangka panjang guna upaya untuk bertahan hidup melalui pengoptimalan dalam melakukan pengembangan potensi desa dan kawasan masyarakatnya melalui berbagai macam komoditas pangan dengan memanfaatkan lahan yang ada, sehingga masyarakat nantinya dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Terdapat Peraturan mengenai Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang nomor

18 tahun 2012 “Adanya suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakatnya, ditandai dengan tersedianya bahan pangan yang cukup baik secara jumlah, mutu, kualitas, dan lainnya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aman, sejahtera”. Adanya kondisi ini tentu saja tak lepas dari adanya dukungan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, yang mana terdapat Peraturan mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 “Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, kemudian juga memiliki peranan untuk dapat melindungi dan mendukung suatu kebijakan yang mengarah pada pembangunan dan bersifat partisipatif sehingga menjadi sangat penting dilakukan. Pemerintah daerah akan menjadi sebuah jalan keluar jika ada permasalahan yang terjadi, karena pemerintah daerah mengenali potensi daerah yang menjadi kekuasaannya. Partisipasi masyarakat juga menjadi penting untuk dapat menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan daerah”.

Kampung Pengolah Jamu Loktobat atau yang sering disebut menjadi Kampung Pejabat. Termasuk ke dalam salah satu objek wisata yang ada di kota Banjarbaru dan menjadi menarik untuk dikunjungi. adanya objek wisata yang terbentuk karena adanya potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut yang diakui tidak hanya sepihak, namun memiliki pihak pendukung seperti adanya peranan pemerintah dalam meresmikan desa wisata tersebut. Masyarakat sebagai pelaku utama dari adanya objek wisata yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kampung Pejabat (Pengolah Jamu Loktobat) ini sendiri menjadi berbeda, karena daerah lainnya yang mendapatkan

julukan program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua ini memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Kampung Pejabat memiliki potensi dalam produksi jamu, antara lain jahe, beras kencur dan kunyit asem dan temulawak yang dapat di produksi sendiri dan masih tergolong skala kecil.

Adanya Kampung Pengolah Jamu Loktabat (Pejabat) ini merupakan peresmian yang dilakukan langsung oleh Walikota Banjarbaru pada tahun 2017, dengan tujuan yang mengarah pada kesejahteraan kehidupan masyarakat, dan diharapkan tidak hanya terbatas pada kawasan wisata yang banyak dikunjungi, tapi juga harus bisa merasakan keunikan dan manfaat dari potensi sumber daya yang dimiliki pada Kampung Pejabat ini yaitu adanya olahan khas jamu tradisional. Maka dari itu, menjadi penting untuk dapat mengembangkan potensi sumber daya yang telah dimiliki dengan terus melakukan program inovasi untuk dapat melakukan pengembangan potensi yang dimiliki yang mengarah kepada kesejahteraan kehidupan masyarakatnya.

Kota Banjarbaru yang kini telah resmi menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2022 mengenai Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru menjadi lokasi yang strategis sehingga bisa menjadi kota yang terus tumbuh dan berkembang dengan potensi sumber daya dan desa wisata yang dimiliki masing-masing daerah pada Kota Banjarbaru (Gessiealla,2019)

Pengunjung dari objek wisata Kampung Pejabat ini sendiri cukup beragam, tak hanya berasal dari dalam daerah saja. Kampung Pejabat ini menjadi salah satu kunjungan wisata yang menarik, jika dilihat langsung suasana dari kampung ini sangat nyaman

dihiasi berbagai lukisan dan ornamen yang diciptakan karena adanya kreativitas dari warga masyarakat sekitar Kampung Pejabat. Adanya Pandemi Covid-19 ini menjadikan warga masyarakat sangat menjaga dengan pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang menjadi dasar bersama untuk bisa menerapkan hal tersebut dengan baik, dan tidak menutup kemungkinan dengan pandemi Covid-19 ini dapat menjadi sebuah kesempatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi untuk dapat membuat sebuah inovasi berupa kreativitas yang dikembangkan dari potensi sumber daya yang sudah dimiliki.

Penelitian ini berkaitan dengan collaborative governance yaitu kolaborasi yang dilakukan bersama dengan pihak pemerintah dan masyarakat serta swasta yang ikut terlibat didalamnya. Kolaborasi yang dilakukan yaitu berupa adanya Program yang terbentuk yaitu Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua. Program ini merupakan sebuah apresiasi dari pihak pemerintah terhadap masyarakatnya khususnya pada Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Keberadaan Kampung Tangguh Banua ini diharapkan akan menjadi panutan bagi warga masyarakat daerah lainnya khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, agar selalu menjaga kebersihan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya memutus percepatan penyebaran virus pandemi Covid-19.

Berdasarkan riset terkait topik penelitian, kolaborasi pemerintah sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat memaksimalkan suatu program ataupun kebijakan yang dibentuk bersama. Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana proses kolaborasi dalam Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua Era Pasca Pandemi Covid-19. Diupayakan dapat meningkatkan pemikiran masyarakat dengan melakukan inovasi untuk dapat memenuhi tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya,

dan kedepannya dapat merumuskan program lainnya terkait dengan Collaborative Governance dalam segala aspek kehidupan, dengan melakukan pengenalan pada potensi sumber daya yang dimiliki pada Kampung Pejabat (Pengolah Jamu Loktabat) Banjarbaru.

Pemerintah merupakan garda terdepan bagi masyarakatnya, karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal kolaborasi yang mengarah pada kesejahteraan hidup masyarakat. Pemerintah dapat mengarahkan masyarakat agar memiliki gambaran kedepannya dengan tujuan terciptanya kemajuan dan peningkatan kehidupan masyarakatnya. Keterlibatan pemerintah menjadi penting agar dapat membuat suatu keputusan dalam dua arah, sehingga terdapat pandangan dari pihak pemerintah dan juga masyarakatnya yang akan menghasilkan kolaborasi bersifat efektif dan efisien.

Kolaborasi Pemerintah menjadi acuan dasar dalam melakukan sebuah proses kegiatan ataupun program yang dijalankan, yang mampu bersinergi dengan beberapa pihak yang terlibat didalamnya dan mengarah pada sebuah pencapaian tujuan bersama yang telah ditetapkan. Masyarakat menjadi bagian penting untuk dapat ikut terlibat didalamnya, tidak terbatas pada peran pemerintah saja yang dapat melakukan sebuah proses kegiatan kolaborasi. Adanya keterlibatan non-pemerintah akan banyak memberikan kontribusi dari berbagai sisi, khususnya dalam hal kolaborasi sehingga dapat memunculkan berbagai inovasi yang tercipta saat dilakukan secara bersama.

Dalam melakukan kolaborasi, peranan dari pemerintah tak terlepas dari partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang terkena imbas dari adanya suatu kebijakan yang dibuat. Peran serta masyarakat menjadi penting untuk diperhatikan dan dapat ditingkatkan dengan mengenali potensi sumber daya yang dimiliki di daerahnya,

sehingga dapat membentuk masyarakat yang mandiri tidak bergantung pada pihak lain yaitu kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dengan mengembangkan usaha dan lain sebagainya, dan dapat mengambil keputusan yang partisipatif dan mengarah pada kesejahteraan bersama. Keberhasilan suatu kolaborasi harus dicapai bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat tercapainya tujuan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat (Ervin R. G. dkk,2021).

Dalam hal kolaborasi, selain dari adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat juga terdapat pihak swasta sebagai pihak pendukung secara finansial yang mengarah kepada keuntungan pihak Bersama. CSR menjadi pihak pendukung dari pihak swasta yang dapat mengoptimalkan baik pada pengalokasian dana dan juga proses pendayagunaannya, maka bisa menjadi solusi alternatif untuk penyelesaian dalam hal kesejahteraan masyarakat (Tasruddin, R.2018).

Masyarakat memiliki peluang untuk dapat membentuk kemandirian pangan, tidak menutup kemungkinan dengan adanya Pandemi Covid-19 saat ini masyarakat menjadi lemah, namun bisa lebih kreatif dan inovatif. Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua sebagai upaya memutus percepatan penyebaran virus pandemi Covid-19, dengan tujuan yang mengarah pada peningkatan kesadaran kalangan masyarakat, dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada dan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya baik dalam bidang perekonomian dan juga pariwisata. Harapan dari program ini dapat menjadi motivasi untuk masyarakat kedepannya melalui kerjasama yang dibentuk dan komitmen untuk dapat patuh terhadap kebijakan yang diberlakukan. (Rahmawati, Y., dkk 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan masalah:

1. Siapa Saja Aktor yang terlibat dalam Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua Era Pasca Pandemi Covid-19 Pada Kampung Pengolah Jamu Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru?
2. Bagaimana Proses Kolaborasi dalam Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua Era Pasca Pandemi Covid-19 Pada Kampung Pengolah Jamu Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Aktor yang terlibat melakukan proses kolaborasi dalam Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua Era Pasca Pandemi Covid-19 pada Kampung Pengolah Jamu Loktabat Banjarbaru.
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Proses Kolaborasi yang dilakukan dalam Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua Era Pasca Pandemi Covid-19 pada Kampung Pengolah Jamu Loktabat Banjarbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memperluas wawasan dan kajian mengenai collaborative governance, yang mengarah pada

pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki daerah sekitar tempat tinggalnya, sehingga dapat dengan mudah dalam menerapkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan keterlibatan pihak swasta didalamnya. Bisa dilakukan dengan terus melakukan pengembangan terhadap daerah sekitar tempat tinggalnya dengan membuat program yang dapat memberikan dampak positif baik terhadap pemerintah dan juga masyarakat serta pihak swasta, khususnya pada Era Pasca Pandemi Covid-19 saat ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Aparat Pemerintah

Hasil Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kedepannya untuk dapat menciptakan Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Stakeholders dalam pembuatan kebijakan ataupun program inovasi baru yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat Era Pasca Pandemi Covid-19.

2. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menjadi solusi guna mewujudkan masyarakat daerah yang lebih maju serta lebih baik kedepannya, khususnya Era Pasca Pandemi Covid-19 saat ini.

3. Bagi Swasta

Hasil Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan bagi

pihak swasta untuk dapat meningkatkan Kerjasama dengan pengendalian yang dilakukan terutama dalam mendukung dan memperkuat finansial dengan penyerahan bantuan, khususnya Era Pasca Pandemi Covid-19.

1.5 Kajian Pustaka

Terdapat 20 jurnal penelitian terdahulu, sebagai sumber acuan yang digunakan untuk dapat melakukan penelitian ini. Dewi Indah Purnama (2019) memaparkan penelitian mengenai “Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Goa Kiskendo di Desa Jatimulyo Kabupaten Kulon Progo”. Kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah sudah dapat dikatakan baik namun masih terkendala dalam meningkatkan jumlah pengunjung yang mengalami penurunan. Yusrim Musa (2020) memaparkan penelitian mengenai “Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengelolaan obyek wisata Alam Posong di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2019”. Kolaborasi Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam yang telah dilakukan (dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses dan kesepahaman bersama). Farid, Ahmad Noval (2018) memaparkan penelitian mengenai “Ketahanan Pangan Wilayah di Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul”. Berdasarkan indikator ketersediaan pangan dan aspek akses pangan masih terdapat desa yang masuk dalam kondisi rawan pangan. Ullinnuha Adha (2019) memaparkan penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 (Studi Kasus Ketahanan pangan di Kecamatan Mlati)”. Nilai efektivitas dari target capaian program peningkatan ketahanan pangan dan terbukti sudah efektif dan efisien.

Nurlely, Radityo Adi Nugroho (2019) memaparkan penelitian mengenai “PKM Penerapan Teknologi mesin pengolah Jahe Instan Kampung Pejabat Kelurahan Loktabat Selatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan produk unggulan Kota Banjarbaru”. Adanya Alat Pembuat Jahe Instan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas produksi jahe instan dari kelompok pengrajin jamu yang ada di Kampung Pengolah Jamu Loktabat Banjarbaru. Herma Sari, Mira Yulianti, Sadik Ikhsan (2019) memaparkan penelitian mengenai “Analisis Finansial Jamu (Studi kasus pada Cafe Jamu di Kampung Pejabat Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan)”. Adanya Cafe jamu pada Kampung Pejabat ini merupakan wujud dari industri kecil dan rumah tangga yang mengarah pada peningkatan pembangunan, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan usaha yang tercipta serta memperbanyak pertumbuhan pembangunan. Herningtyas Nautika Lingga, Fadlilaturrahmah, Susilowati (2018) memaparkan penelitian mengenai “Pelatihan Pembuatan Jamu Instan sebagai Diversifikasi Produk Pengrajin Jamu di Kampung Pejabat Kelurahan Loktabat Selatan Banjarbaru”. Adanya Pelatihan sekaligus praktek proses pembuatan jamu instan ini sangatlah membantu pengrajin jamu sehingga dapat memproduksi secara mandiri dan diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dari para pengrajin jamu yang sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari.

Yusrin Rahmawati, Farah Fadillah Anugrah, Erva Mutiara Hati, Ali Roziqin (2021) memaparkan penelitian mengenai “Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar Stakeholder dalam merespons Pandemi Covid-19”. Adanya Program Kampung Tangguh ini merupakan bentuk perwujudan kolaborasi yang dilakukan antar stakeholder, masyarakat terlibat di dalamnya karena mengharuskan adanya komitmen sebagai upaya

untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Khusnul Khatimah (2019) memaparkan penelitian mengenai “Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengelolaan Desa Wisata Pulesari di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”. Kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat telah berjalan cukup baik terlihat dengan adanya pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang melibatkan semua pihak. Ela Syahrani Dayanti (2020) memaparkan penelitian mengenai “Tata Kelola Desa Wisata berbasis masyarakat dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus: Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung)”. Pemerintah Daerah dan Stakeholder dari pihak swasta dan masyarakat telah melakukan proses kolaborasi dari tahap awal hingga akhir yaitu dari adanya pembuatan tujuan yang sama untuk dapat mendukung sektor pariwisata hingga adanya wujud nyata kolaborasi yang dijalankan dalam tata kelola Desa Wisata Terong.

Audi Ramadhan, Kinanti Prawita, M.Andik Izzudin, Gitta Amandha (2021) memaparkan penelitian mengenai “Analisis Strategi dan Klasterisasi Ketahanan pangan Nasional dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Terdapat indeks ketahanan pangan nasional yang dibagi ke dalam 3 klaster yaitu tinggi, sedang dan rendah. Mayoritas hampir 24 provinsi memiliki indeks ketahanan sedang. Husna Ni'matul Ulya (2020) memaparkan penelitian mengenai “Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur pada Kawasan Agropolitan”. Strategi yang dilakukan untuk dapat memaksimalkan potensi kawasan agropolitan di tengah pandemi covid-19 ini yaitu dengan memaksimalkan sasaran dan tujuan yang dibuat, seperti dengan melakukan peningkatan kerjasama antat pemerintah dengan semua pihak yang terkait. Abdullah, Indri Nuraeni (2020) memaparkan penelitian mengenai “Program

Pemberdayaan Ketahanan Pangan Keluarga Terhadap Ketersediaan Pangan Keluarga di Desa Berdaya”. Adanya Program Ketahanan Pangan ini mampu memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Encang saepudin, Ninis Agustini Damayani, Agung Budiono (2018) memaparkan penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat pada Program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bandung”. Terdapat pembagian tingkat partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan yaitu partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan dan evaluasi program yang positif dan pelaksanaan program serta pengambilan manfaat positif.

Herie Saksono (2020) memaparkan penelitian mengenai “Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif”. Innovation Hub menjadi strategi yang dilakukan untuk dapat membuat pemerintahan daerah yang inovatif dan berperan sebagai media kolaborasi membentuk inovasi daerah. Herlan, Efriani, Agus Sikwan, Hasanah, Galuh Bayuardi, Endang Indri Listiani, Yulianti, (2020) memaparkan penelitian mengenai “Keterlibatan Akademisi dalam menanggulangi Dampak Covid-19 terhadap masyarakat melalui aksi berbagi sembako”. Masyarakat daerah merupakan masyarakat yang memiliki potensi lebih besar untuk mengalami resiko kerugian akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu adanya peran dari pemerintah dan akademisi untuk menanggapi hal ini menjadi sangat penting untuk dapat dilakukan. Dan tidak terbatas pada bentuk pengabdian masyarakat saja namun juga bisa berupa berbagai alternatif dan wujud lainnya. Endik Hidayat, Aufa Izzudin Baihaqi, Rustono Farady Marta (2022) memaparkan penelitian mengenai “Kolaborasi Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat selama Pandemi Covid-19 Desa Jelgung Kabupaten Sampang. Adanya aktor yang berperan untuk dapat memberdayakan masyarakatnya yang mengarah pada kolaborasi

yang mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa khususnya pada saat Pandemi Covid-19. Salah Satu aktor yang berperan yaitu dari Kepala Desa Daerah tersebut dengan dapat melakukan adanya unit usaha baru untuk dapat memperbaiki ekonomi masyarakat desanya.

Ajeng Maharani, Faula Mahalika, 2020) memaparkan penelitian mengenai “New Normal Tourism sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi. Adanya Pandemi Covid-19 menjadikan sebuah perubahan yang signifikan terutama pada kebiasaan kehidupan masyarakatnya dalam menghadapi adanya perubahan ini untuk dapat memperkuat ketahanan Ekonomi khususnya pada Sektor pariwisata dengan melakukan langkah yang inovatif kedepannya. Heri Kurniawansyah HS, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, Sri Nurhidayati, 2020) memaparkan penelitian mengenai “Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 pada Masyarakat Rentan di Indonesia”. Pemerintah harus melakukan adanya kebijakan yang strategis. Sehingga nantinya kebijakan yang dibuat akan mengarah pada implementasi kebijakan stabilisasi dengan dapat menjaga harga ketahanan pangan di angka yang stabil. Sudirmansyah, Ruswendi, Andi Ishak, Emlan Fauzi, Shannora Yuliasari, Jhon Firison, 2021) memaparkan penelitian mengenai “Peran Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan pada saat Wabah Pandemi Covid-19. Peran Penyuluhan Pertanian lebih banyak mengarah pada upaya untuk dapat mempertahankan ketahanan pangan dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19. Sangat penting untuk adanya peran pemerintah yang ikut serta, untuk dapat memfasilitasi adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai pendukung kebijakan program pemerintah.

Tabel 1.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Tema Penelitian	Nama dan Tahun Penulis	Kesimpulan
1.	Collaborative Governance	<ul style="list-style-type: none"> - Dewi Indah Purnama (2019); - Yusrim Musa (2020); - Yusrin Rahmawati, Farah Fadillah Anugrah, Erva Mutiara Hati, Ali Roziqin (2021); - Khusnul Khatimah (2019); - Ela Syahrani Dayanti (2020); Herie Saksono (2020). 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan terutama untuk dapat membentuk komitmen dari awal hingga akhir yang mengarah pada kesejahteraan masyarakatnya. - Dalam proses Kolaborasi Pemerintah berperan sebagai pihak yang membantu dalam hal memfasilitasi kegiatan dan partisipasi masyarakat yang dibutuhkan guna mencapai keberhasilan yang akan dituju. Serta adanya keterlibatan pihak swasta yang menjadi penting sebagai pelengkap didalamnya.
2.	Program Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Farid, Ahmad Noval (2018); - Ullinnuha Adha (2019); - Audi Ramadhan, Kinanti Prawita, M.Andik Izzudin, Gitta Amandha (2021); - Abdullah, Indri Nuraeni (2020). 	<ul style="list-style-type: none"> - Suatu daerah memiliki batas capaian atau indikator tertentu. Pada Program Ketahanan Pangan sendiri sangat dibutuhkan adanya kesadaran masyarakat, yang mana nantinya akan memberikan manfaat pada masyarakat itu sendiri. - Masyarakat harus dapat melakukan peningkatan ketahanan pangan. seperti dapat melakukan peningkatan produksi dan peningkatan pada teknologi yang digunakan

3.	Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Husna Ni'matul Ulya (2020); - - Herlan, Efriani, Agus Sikwan, Hasanah, Galuh Bayuardi, Endang Indri Listiani, Yulianti (2020); - Endik Hidayat, Aufa Izzudin Baihaqi , Rustono Farady Marta (2022) ; - Ajeng Maharani, Faula Mahalika (2020); - Heri Kurniawansyah HS, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, Sri Nurhidayati (2020); - Sudirmansyah, Ruswendi, Andi Ishak, Emlan Fauzi, Shannora Yuliasari, Jhon Firison (2021). 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pandemi Covid-19 ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat daerah yang lebih rentan, yang akan memunculkan kebiasaan baru. - Covid-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial namun juga pada masalah ekonomi khususnya pendapatan masyarakat, kemudian juga pariwisata yang menjadikan daerahnya menjadi lebih sepi pengunjung.
4.	Kampung Pengolah Jamu Loktabat	<ul style="list-style-type: none"> - Nurlely, Radityo Adi Nugroho (2019); - Herma Sari, Mira Yulianti, Sadik Ikhsan (2019); - Herningtyas Nautika Lingga, Fadlilaturrahmah, Susilowati (2018). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kampung Pengolah Jamu menjadi salah satu unit usaha yang ada dalam skala kecil yang ada di lingkungan masyarakat. - Adanya kampung ini merupakan hasil dari kreativitas masyarakatnya, namun tentu saja masih banyak yang harus perlu ditingkatkan kedepannya, baik dari segi produksi maupun keuntungan yang mengarah kepada kehidupan yang lebih baik kedepannya.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan 20 jurnal penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sumber acuan,

terdapat berbagai macam pembahasan yang tentu saja mengarah dan sesuai dengan topik penelitian yang digunakan, yaitu mengenai “Collaborative Governance dalam Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua Era Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Kampung Pengolah Jamu Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru).” Belum ditemukan pembahasan mendetail mengenai studi kasus dalam topik penelitian, oleh karena itu menjadi penting dan menarik sehingga dilakukan penelitian ini.

Dari 20 jurnal penelitian terdahulu, diantaranya mengacu pada collaborative governance yaitu baik kolaborasi pemerintah dan masyarakat yang penting untuk dilakukan sehingga mengarah pada kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dan keterlibatan pihak swasta didalamnya. Kemudian juga terdapat mengenai adanya program Ketahanan Pangan yang menjadi bentuk perwujudan dari kolaborasi yang dilakukan khususnya pada masa pandemi covid-19 saat ini.

Penelitian terdahulu banyak menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan hasil wawancara serta dokumentasi lapangan. Adanya Penelitian ini sendiri diarahkan terutama pada Kampung Pengolah Jamu Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru. Penelitian terdahulu menggunakan lebih sering menggunakan teori Ansell and Gash,2007 dalam Proses Kolaborasi.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Collaborative Governance

Teori Collaborative Governance (Donahue,2004) merupakan bentuk perwujudan Kerjasama pihak pemerintah dalam memenuhi tujuan yang ingin

dicapai yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat melalui sebuah kolaborasi dengan pihak terkait baik organisasi maupun individu. Tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu berupa sebuah kolaborasi yang efektif dengan kunci utama melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang jelas terutama mengarah kepada pemberdayaan masyarakat sehingga memberikan dampak baik dalam jangka Panjang.

Proses Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang melibatkan kepentingan bersama dengan tujuan mengarah pada saling menguntungkan antar aktor pemerintahan. Terdapat 3 tahapan yang menjadi proses dalam Collaborative Governance (Ratner,2012), yaitu sebagai berikut :

- 1.) Dengan Melakukan identifikasi terhadap peluang yang dimiliki,menjadi proses awal untuk memulai yang dapat memudahkan kolaborasi antar pihak pemerintah dan masyarakat dan keterlibatan swasta didalamnya. Masyarakat sendiri nantinya dapat memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan peluang ataupun potensi yang dimiliki. Hal ini harus dapat dipahami dan dapat dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak, baik dari sisi pemerintah, masyarakat dan juga swasta.
- 2.) Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan strategi diskusi, yaitu dengan membahas terkait langkah apa yang akan diambil, mempersiapkan solusi dan jalan keluar jika suatu saat hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga dapat melakukan langkah efektif untuk dapat memecahkan permasalahan yang terjadi sehingga

dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.

- 3.) Tahapan terpenting yang dapat dilakukan yaitu dengan penentuan bagaimana strategi yang efektif untuk dapat mengantisipasi permasalahan sehingga dapat menjaga proses kolaborasi agar dapat bertahan dan tetap berjalan dalam jangka waktu panjang.

Kriteria Collaborative Governance (Ansel C dan Gash A,2007) terdapat enam kriteria untuk kolaborasi yaitu sebagai berikut :

- 1) terdapat forum atau lembaga yang mewadahi ,
- 2) terdapat peserta yang terlibat didalamnya,
- 3) peserta bersifat aktif dalam pengambilan keputusan,
- 4) forum atau Lembaga yang mewadahi harus bersifat resmi dan rutin melakukan pertemuan sebagai momen untuk berdiskusi,
- 5) forum atau Lembaga yang ada harus mempunyai tujuan yang jelas yang mengarah kepada pembuatan keputusan dengan capaian untuk kepentingan Bersama,
- 6) fokus adanya kolaborasi untuk kepentingan Bersama untuk pemberdayaan masyarakat.

Kriteria Keberhasilan sebuah kolaborasi Pemerintah (Goldsmith dan Kettl,2009) yaitu adanya struktur jaringan yang merupakan keterkaitan antara bagian satu dengan bagian lainnya dan secara bersamaan mencerminkan unsur dari bagian jaringan yang ditangani. Adanya kerjasama pemerintahan Kolaboratif tidak boleh hanya terfokus pada satu pihak, karena tidak adanya

kekuasaan ataupun bagian yang mendominasi didalamnya, sehingga harus memiliki kesetaraan dalam hal tanggung jawab guna mencapai tujuan bersama. Adanya suatu Komitmen untuk mencapai sebuah tujuan menjadi penting untuk dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang mana masing-masingnya memiliki pertanggung jawaban, baik dari pemerintah dan juga masyarakat serta swasta sebagai pelaku kepentingan yang terlibat didalamnya. Komitmen dalam sebuah kolaborasi pemerintah akan melibatkan suatu proses yang mengarah pada pemecahan masalah secara bersama. Adanya kepercayaan diantara pemerintah dan masyarakat dan juga swasta, sehingga dapat mengetahui informasi yang ada baik dari pemerintah dan juga masyarakat serta swasta yang mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Maka dari itu, menjadi penting untuk dilakukan agar dapat memahami peranan sebagai pemerintah untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan kolaborasi pemerintah. Kolaborasi pemerintah mengarah pada hubungan yang dibentuk antara pihak pemerintah dan masyarakat, yang didalamnya terdapat aturan yang harus ditaati dan dipahami dengan baik sesuai dengan kepentingan bersama. Aturan yang dibuat tentu saja disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan sehingga akan memudahkan dalam proses pelaksanaannya. Dalam Proses Kolaborasi pemerintah perlu adanya komunikasi dengan semua pihak yang terlibat didalamnya, karena setiap orang harus dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembuatan keputusan kebijakan yang berlaku nantinya. Selain itu juga harus adanya informasi yang jelas yang disajikan untuk dapat diakses dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Maka dari itu harus terdapat kejelasan

mengenai ketersediaan sumber daya bagi masing-masing pihak yang terlibat.

Motivasi untuk dapat Memperkuat dan meningkatkan Proses pergerakan prinsip bersama (Emerson, Nabatchi & Balogh :2013): Motivasi ini dilakukan untuk upaya penguatan diri yaitu adanya kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal dan komitmen. Terdapat hambatan yang biasa terjadi dalam proses Collaborative governance yaitu kurangnya inovasi yang dilakukan baik dari pihak pemerintah ataupun dari masyarakat dan swasta, tanpa mengetahui potensi akan daerahnya yang begitu besar untuk terus dikembangkan. Kemudian adanya keterbatasan antara pihak pemerintah, masyarakat dan swasta juga menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Oleh karena itu, menjadi bagian penting untuk melakukan motivasi dalam proses kolaborasi pemerintah yaitu kepercayaan bersama, terdapat pihak yang terlibat dalam melakukan kolaborasi dengan menjaga hubungan baik satu sama lain, saling membuktikan bahwa mereka dapat berkomitmen dan dapat dipercaya kedepannya serta mampu untuk bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Hal dasar ini menjadi bagian penting dalam proses kolaborasi pemerintah. Kemudian adanya kemampuan untuk melakukan pemahaman bersama dengan melakukan kepercayaan sehingga dapat melakukan kerjasama yang baik kedepannya dan dapat mengerti satu sama lain. Legitimasi internal yaitu adanya sebuah pengakuan yang berasal dari dalam kolaborasi, yaitu pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus dapat dipercaya dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang menjadi bagian terpenting dalam kolaborasi yaitu adanya kemampuan untuk dapat melakukan komitmen khususnya dalam jangka waktu yang panjang. Maka

dari itu, 4 tahapan motivasi ini sangatlah berkaitan satu sama lain dan menjadi penting untuk dilakukan dalam proses kolaborasi.

Prinsip Penerapan Collaborative Governance Seigler (2011:968-970) menguraikan delapan prinsip utama dalam penerapan Collaborative Governance:

- a. Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik
- b. Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik
- c. Tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk memberdayakan warga masyarakat
- d. Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik
- e. Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan
- f. Kebijakan harus strategis
- g. Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik
- h. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas

1.6.2 Ketahanan Pangan

Teori Ketahanan Pangan (Oxfam,2001) suatu kondisi dimana memiliki akses dan kontrol mandiri atas produksi bahan pangan. (Nugroho & Mutisasi,2015): suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dengan upaya yang telah dilakukan. (Asmara, dkk, 2012): suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup baik dari jumlah dan kualitas yang dimiliki. (Kahar,2008): ketahanan pangan sebagai keadaan dimana setiap

individu dapat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar dapat memenuhi hidup yang baik, sehat serta produktif.

Mewujudkan Ketahanan Pangan yaitu adanya suatu keadaan terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, baik berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang bermanfaat bagi kesehatan dan perkembangan kehidupan manusia kedepannya. Terpenuhinya pangan dalam kondisi yang aman dan bebas dari bahan kimia akan dapat mengganggu dan membahayakan sehingga mempengaruhi proses keberlangsungan hidup kedepannya. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata dan menyeluruh. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang mudah digapai dengan harga yang terjangkau.

Aspek Ketahanan Pangan (Kasryno dalam Bulog: 1997): ketersediaan pangan merupakan sebuah kondisi, tersedianya bahan pangan dari hasil produksi warga masyarakatnya sendiri yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya dalam kehidupan sehari-hari. Adanya ketersediaan pangan ini membuktikan bahwa masyarakatnya dapat berkembang dan bergerak maju menciptakan sumber daya untuk upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemanfaatan pangan dapat berupa cara pengolahan yang dilakukan, penyimpanan serta melakukan proses distribusi kepada pihak lain.

Terdapat tiga komponen utama pembentukan ketahanan pangan rumah tangga, yaitu sebagai berikut :

- 1.) Produksi sendiri,
- 2.) Cadangan pangan, dan

3.) Pendapatan.

Jika Pendapatan rumah tangga yang dihasilkan cukup memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan secara menyeluruh baik dari produksi sendiri ataupun dari pasar. Pendapatan yang cukup menjadi salah satu faktor penting untuk dapat menciptakan ketahanan pangan rumah tangga yang baik. Oleh karena itu penciptaan lapangan kerja produktif menjadi alternatif yang harus dilakukan guna tercapainya ketahanan pangan baik dalam skala rumah tangga maupun nasional.

Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan tersebut yaitu meliputi; ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (*stability*) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Terkait dengan masalah dalam ketahanan pangan dapat terjadi apabila salah satu unsur ketahanan pangan tersebut terganggu. Namun dalam realitanya, pemahaman terhadap ketahanan sering direduksi hanya ditekankan pada unsur penyediaan dan harga saja, atau bahkan ada yang hanya menekankan pada aspek yang lebih sempit yang menyamakan pengertian ketahanan pangan dengan pengertian swasembada.

Ketiga pilar ketahanan pangan tersebut harus dapat terwujud secara bersama-sama dan seimbang. Pilar ketersediaan dapat dipenuhi baik dari hasil produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. Pilar keterjangkauan dapat dilihat dari keberadaan pangan yang secara fisik berada di dekat konsumen dengan kemampuan ekonomi konsumen untuk dapat membelinya (memperolehnya). Sedangkan pilar stabilitas dapat dilihat dari kontinuitas pasokan dan stabilitas harga yang dapat diharapkan rumah tangga setiap saat dan di setiap tempat.

Arah Pembangunan Ketahanan Pangan yaitu dengan dapat mewujudkan kemandirian pangan guna menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Perwujudan ketahanan pangan merupakan suatu tanggung jawab yang dilakukan baik dari pihak pemerintah dan masyarakat. Adanya ketahanan pangan bertujuan untuk dapat memperkuat ketahanan pangan dari skala kecil hingga Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan dibutuhkan adanya strategi pembangunan ketahanan umum yang mengarah pada pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan, tujuan lainnya yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung, disertai dengan upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan Ketahanan Pangan mengarah pada upaya mewujudkan hidup yang produktif dan mandiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Ketahanan Pangan (Rachman & Suhartini), selain adanya ketersediaan dan distribusi pangan di daerah tempat tinggal, faktor lain yang mempengaruhi yaitu

adanya kemampuan surplus padi, daya beli yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita serta aksesibilitas terhadap pangan, yang tercermin pada harga pangan ditingkat rumah tangga.

Alternatif Program Ketahanan Pangan yang menjadi implikasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembentukan 4 program utama, yaitu sebagai berikut: (Suryana Achmad. 2008)

1. Mengadakan Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat

Pembentukan program ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat pada daerah tertentu khususnya wilayah kecil seperti desa atau kecamatan. Sehingga upaya ini diarahkan untuk dapat melakukan peningkatan kemampuan rumah tangga mengakses pangan, baik dari produksi sendiri maupun dari pasar.

2. Mengadakan Program Peningkatan Kapasitas Produksi Pangan

Pembentukan program ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas nasional dalam peningkatan produksi pangan dalam skala lebih besar, sesuai dengan respons permintaan pangan penduduk dan melakukan pemerataan penyediaan bahan pangan. Program ini diarahkan untuk dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang telah dimiliki sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan berbasis sumber daya nasional.

3. Mengadakan Program Pengelolaan Distribusi dan Pasar Pangan

Pembentukan Program ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasi adanya ketidakseimbangan ataupun ketimpangan

yang terjadi dalam pemenuhan bahan pangan, Sehingga program ini diarahkan untuk dapat mengurangi permasalahan yang ada dengan mencegah naik turunnya harga pangan pokok dengan memperhatikan waktu, tempat dan pendapatan yang ada, dengan adanya upaya yang dilakukan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sehingga menjadi ke arah yang lebih baik.

4. Mengadakan Program Peningkatan Mutu Konsumsi Pangan

Pembentukan Program ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas potensi sumber daya yang telah dimiliki.

Maxwell dan Smith dalam Gevisioner (2010:15) mengatakan bahwa ketahanan pangan menunjukkan adanya akses setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan.

Hal ini berarti ketahanan pangan memiliki empat dimensi, yaitu:

- a. kecukupan pangan, yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi untuk aktif dan hidup sehat,
- b. akses pangan, yang berarti adanya kemampuan untuk memproduksi, membeli pangan maupun menerima pemberian pangan,
- c. jaminan, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan dan
- d. waktu, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan secara berkelanjutan.

1.6.3 Pandemi Covid-19

Teori Pandemi Covid-19 (Menurut WHO, World Health Organization) Pandemi Covid-19 yaitu adanya penyebaran virus corona ke berbagai negara yang mendunia dan berpotensi terhadap rasa sakit yang muncul karena dapat berjangkit dimanapun dan kapanpun karena bersifat menular dan mempengaruhi sistem pernafasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). Covid-19 dapat menyebabkan kematian akibat penyakit pernafasan dan pneumonia akut. Virus ini menyebar dengan cepat pada manusia dan menyerang pada siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, dan dewasa serta lansia (Sarmigi,2020).

Dampak Pandemi Covid-19, membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi. Dampak dari Covid-19 sangat mempengaruhi berbagai sektor yang ada. Indonesia telah membuat kebijakan pembatasan untuk bepergian selama masa pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk memutus rantai percepatan penyebaran Covid-19. Dampak Covid-19 pada sektor pariwisata menyebabkan wisatawan menjadi menurun, terdampak pula pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah karena mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Faktor Risiko Covid-19 dan penyebaran Covid-19 berada diluar dugaan, karena dapat berlangsung dengan cepat dan menyerang siapa saja tanpa mengenal kelompok usia. Berawal dari penghujung tahun 2019, kemudian kasus pertama pada awal bulan maret 2020. Virus Covid-19 awalnya berkembang pada hewan dan menyerang manusia.

Pencegahan Penularan Covid dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO untuk memutus rantai percepatan penyebaran Covid-19, sebagai berikut:

- 1) Menggunakan masker, sebagai alat pelindung diri dari terpapar virus Covid-19 yang tak kasat mata. Masker digunakan untuk melindungi wajah, mulut dan hidung ketika sedang berinteraksi dengan oranglain. Masker menjadi alat pelindung diri yang sangat sederhana dan mudah untuk didapatkan.
- 2) Menggunakan Hand sanitizer, sebagai antiseptik yang digunakan untuk melindungi dan mencegah terpapar virus Covid-19 khususnya pada area tangan. Hand sanitizer dapat membunuh kuman dalam waktu kurang dari 30 detik dibandingkan dengan air, sabun dan lainnya karena terdapat kandungan alkohol didalamnya.
- 3) Menerapkan Social distancing, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menjauhi keramaian menjaga jarak sosial umumnya dilakukan dengan jarak aman lebih dari 1 meter, tidak berkeliaran keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat ataupun mendesak.
- 4) Menjaga Kesehatan dengan memperhatikan pola makan yang sehat, olahraga yang teratur dan menghindari stres. Mengonsumsi vitamin juga penting untuk dapat dilakukan. Menjaga kesehatan juga bisa dengan melakukan pola hidup yang bersih sehingga tidak terpapar oleh virus Pandemi Covid-19 yang dapat muncul dari mana saja.

Pencegahan Penularan Covid-10 menurut Kemenkes RI dalam Health Line (2020), sebagai berikut:

1) Sering Mencuci Tangan, karena penyebaran penyakit bersumber dari tangan maka akan menjadi efektif jika mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air mengalir sehingga dapat membunuh kuman penyakit. Mencuci bahan makanan, juga penting untuk dilakukan dengan merendam bahan makanan bisa dengan air bersih ataupun air hangat kemudian disimpan dengan baik pada kulkas atau lemari es sehingga tetap segar jika ingin dikonsumsi. Tidak hanya menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan tempat tinggal juga penting untuk dilakukan dengan membersihkan perabotan rumah bisa dengan menyemprotkan cairan desinfektan pembunuh kuman dan bakteri.

2) Mengurangi Kontak langsung dengan orang, dengan menghindari kontak kulit untuk mencegah penyebaran pandemi covid-19, dan dapat mengurangi menyentuh area wajah. menjaga jarak sosial dan menghindari berkumpul dalam jumlah banyak yaitu dengan melakukan physical distancing dengan menjaga jarak satu meter dengan orang lain. Dapat juga menghindari berbagi barang pribadi yang dipakai bersamaan guna mencegah terinfeksi pandemi Covid-19.

3) Etika ketika bersin dan batuk, penyebaran virus Covid-19 ini melalui udara ataupun pernafasan. Oleh karena itu ketika bersin ataupun batuk, agar dapat menutup mulut dan hidung agar tidak terpapar percikan kelenjar liur.

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari Pandemi Covid-19. Pemerintah juga telah melakukan isolasi sosial untuk dapat mengurangi dampak

dari kebijakan yang dilakukan, pemerintah juga telah memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak Covid-19 (Sarmigi,2020).

Terkait dengan Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Maka dari itu, ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat (food sovereignty) dan mandiri (food resilience).

Ketahanan Pangan Kunci Hadapi Potensi Krisis Global, Pemerintah juga melakukan upaya mendorong ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan.

Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional Sedangkan dari aspek kelembagaan, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Lembaga ini diberikan kewenangan terkait pengelolaan cadangan pangan Pemerintah, pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, pengembangan panganekaragaman pangan dan pengembangan potensi pangan lokal..Pemerintah juga mengembangkan berbagai kawasan sentra mandiri pangan berbasis korporasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi produksi pertanian. Pada penelitian ini kolaborasi

yang dilakukan mengarah pada ketahanan pangan dalam Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua yang dilakukan dari hasil Kerjasama yang terbentuk dan dijalankan kedepannya

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Collaborative Governance

Kolaborasi Pemerintah merupakan suatu upaya yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Dalam Kolaborasi pemerintah ini harus terdapat adanya bentuk kerjasama pihak pemerintah dan masyarakat dan pihak swasta yang harus terlibat didalamnya serta harus memiliki komitmen dalam jangka waktu panjang. Adanya Kolaborasi ini harus bersifat saling menguntungkan, artinya baik pihak pemerintah dan masyarakat serta swasta harus mendapatkan dampak baik satu sama lain.

1.7.2 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan pangan baik dalam ruang lingkup kecil ataupun besar. Terpenuhinya kebutuhan pangan terdapat berbagai aspek baik secara kualitas, jumlah dan lain sebagainya. Terpenuhinya kebutuhan pangan ini karena adanya kemampuan dari masyarakat itu sendiri untuk dapat mengembangkan dan mempertahankan potensi sumber daya yang dimiliki di daerah sekitar tempat tinggalnya.

1.7.3 Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan suatu penyakit yang kini sudah tidak asing lagi, disebabkan oleh infeksi virus yang membahayakan dan bahkan berakibat fatal yaitu menyebabkan kematian seseorang. Pandemi Covid-19 dapat

menyerang semua kalangan usia dengan penyebaran melalui udara dan saluran pernafasan yang terjadi begitu cepat.

1.8 Definisi Operasional

Dalam hal ini terkait dengan kajian teori yang dimasukkan dan survei keadaan yang ada dilapangan serta mengacu pada teori yang sudah ada didalam penelitian terdahulu. Kolaborasi sebagai wujud kerjasama yang dilakukan baik dengan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Adanya kolaborasi yang dilakukan tentu saja mengarah pada suatu tujuan yang ingin dicapai dan dirasakan manfaatnya secara bersama. Adanya Teori Abidin,2013 mengenai aktor yang terlibat dalam proses Governance dan Teori Ratner,2012 mengenai proses Collaborative Governance menjadi paling relevan dan dapat dengan mudah dipahami yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Aktor yang terlibat dalam Proses Governance (Teori,Abidin 2013)	Pemerintah	Kepolisian Resort Banjarbaru : Mengarahkan Pihak Kota Banjarbaru Kepolisian Sektor Bhabinkamtibmas : Mengarahkan Pihak Kelurahan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Banjarbaru Kecamatan Banjarbaru Selatan : Mengarahkan Pihak Kecamatan
		Masyarakat	Kampung Pejabat : Masyarakat ikut serta dan terlibat dalam Proses kolaborasi.
		Swasta	CSR BRI Unit Loktabat : mendukung dan penyedia berupa finansial.

2.	Proses Kolaborasi Dalam Program Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Banua (Teori Ratner,2012)	Fase Mengidentifikasi Hambatan dan atau Peluang (Mendengarkan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah mengarahkan untuk dapat Menganalisis kendala hambatan dan ataupun peluang - Mengajukan alternatif tindakan berupa kebijakan bersama yang dilakukan.
		Fase Strategi Berdiskusi Untuk Menentukan rencana kedepan (Dialog)	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dilibatkan untuk dapat Melakukan pertemuan dengan diskusi dialog tatap muka - Hasil dari diskusi menjadi Langkah efektif kedepannya.
		Fase Merencanakan Tindakan Kolaborasi (Pilihan Bersama)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah mengarahkan masyarakat bersama pihak swasta untuk dapat Menyusun kebijakan terkait rencana pelaksanaan yang telah disepakati Bersama - Implementasi kebijakan yang dibuat Bersama.

Sumber: diolah oleh peneliti

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus bertujuan untuk dapat menganalisis siapa saja aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi dan bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan dalam program ketahanan pangan Kampung Tangguh Banua. Alasan menggunakan metode kualitatif adalah atas dasar pertimbangan yang telah dibuat, metode kualitatif akan lebih memudahkan dalam proses pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait penelitian. Dan data yang diambil akan lebih faktual, menyeluruh dan mendalam, dengan tidak mengutamakan besarnya populasi. Penelitian kualitatif tidak berdasarkan angka melainkan mengacu kepada sumber informasi yang telah dikumpulkan dari sumber buku

ataupun jurnal terkait topik penelitian, kemudian juga dokumentasi, observasi langsung, serta wawancara bersama narasumber.

Studi kasus merupakan suatu jenis penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam mengenai program, peristiwa dan aktivitas yang terjadi (Zabala, J. 2017). Studi Kasus merupakan studi yang mendalam mengenai individu dengan jangka waktu tertentu yang dilakukan secara totalitas (Henricus Dimas F.C.B.2016). Jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus berfokus pada pencarian solusi dari permasalahan yang bersifat aktual dengan pengumpulan data sebanyak mungkin agar dapat mempermudah proses penelitian. Pemilihan Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini tentu saja karena adanya rumusan masalah terkait program yang dibuat atas adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat yang kemudian akan diteliti lebih dalam.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian berada di Kampung Pejabat (Pengolah Jamu Loktabat) berada di Jalan R O Ulin Gang Baru RT 06 RW 02 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun alasan tempat ini menjadi lokasi penelitian adalah karena adanya kampung pejabat ini menjadi salah satu yang menerima adanya Program Kampung Tangguh Banua untuk dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi dan mentaati protokol kesehatan khususnya pada masa pandemi

covid-19.

Selain itu juga Kampung Pejabat (Pengolah Jamu Loktabat) ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang, karena kemampuannya untuk dapat memproduksi bahan dasar dari olahan jamu tradisional yang dijual oleh warga masyarakat sekitar. Selain itu juga karena wilayah dan daerah yang cukup mudah untuk diakses sehingga dapat mempermudah dalam proses pengumpulan data dengan tujuan untuk dapat mendapatkan informasi yang jelas, aktual dan lengkap.

1.9.3 Data dan Sumber Data

Data Primer: (Menurut Sugiyono, 2018) data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang didapatkan dari informan atau narasumber terkait topik penelitian, sumber data dilakukan langsung dilapangan pada lokasi penelitian sebagai data primer.

Data Sekunder : (Menurut SUGiyono,2018) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh sebagai data pendukung data tambahan untuk dapat melengkapi penelitian yang dilakukan. Data Sekunder berguna untuk dapat memperkuat hasil peneliitian yang diperoleh dari hasil analisis baik berupa Buku, Jurnal, Artikel terkait dengan topik penelitian.

Wawancara dilakukan dengan narasumber terkait dengan topik penelitian, yang dipaparkan melalui tabel diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 3

Data Primer

No.	Informan	Jabatan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Pihak Masyarakat dan Pelopor adanya Kampung Pejabat	Ketua RT Kampung Pejabat (Pengolah Jamu Loktabat) Banjarbaru	Wawancara Langsung
2.	Pihak Pemerintah yang ikut serta pada Kampung Pengolah Jamu Loktabat	Kepolisian Resort Banjarbaru	Wawancara Langsung
3.	Pihak Pemerintah yang ikut serta dalam pada Kampung Pengolah Jamu Loktabat	Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru	Wawancara Langsung
4.	Pihak Pemerintah yang ikut serta pada Kampung Pengolah Jamu Loktabat	Kepolisian Sektor Bhabinkamtibmas Loktabat Selatan	Wawancara Langsung
5.	Pihak Pemerintah yang ikut serta pada Kampung Pengolah Jamu Loktabat	Mantan Lurah Periode 2013-2017	Wawancara Langsung
6.	Pihak Pemerintah yang ikut serta pada Kampung Pengolah Jamu Loktabat	Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan	Wawancara Langsung
7.	Penyedia Financial yang terlibat pada Kampung Pengolah Jamu Loktabat	BRI Unit Loktabat	Wawancara Langsung

Sumber: diolah oleh penulis

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam penelitian yang harus bersifat jelas dan spesifik. Teknik Pengumpulan Data Menurut Sugiyono,2018 diperoleh dari Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Triangulasi. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Metode Observasi: melakukan pengumpulan data melalui observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi data penelitian. (Menurut Sugiyono,2018), observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi, yang kemudian dapat disimpulkan dari hasil yang telah diamati secara langsung.

Metode Wawancara: melakukan wawancara tersusun dengan narasumber terkait yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi data penelitian, metode wawancara dilakukan secara lisan melalui percakapan dengan beberapa pertanyaan terkait sehingga bisa menjawab terkait permasalahan dalam penelitian. (Menurut Sugiyono, 2018) adanya metode wawancara ini menjadi sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan dua arah antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk dapat memperoleh informasi dari narasumber terkait topik penelitian. Tujuan dari melakukan metode wawancara ini untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mendalam dan juga bersifat

relevan, terbaru serta aktual.

Metode Dokumentasi: melakukan sesi dokumentasi untuk data pendukung dan sebagai tanda bukti telah melakukan observasi dan wawancara ke lokasi penelitian. Metode Dokumentasi dapat berupa catatan hasil wawancara, foto Bersama narasumber, kemudian juga rekaman baik secara audio maupun video. (Menurut Sugiyono,2018) metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara yang dilakukan sehingga dapat mempunyai nilai keakuratan yang tinggi.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Analisis Data: merupakan proses dalam analisis data dengan berdasarkan dari hasil wawancara langsung, catatan lapangan, dan dokumen terkait jurnal penelitian yang saling berkaitan satu sama lain, dan harus mudah dipahami baik oleh diri sendiri ataupun orang lain sebagai pembaca nantinya. Teknik analisis data kualitatif yaitu sebuah proses analisis yang disesuaikan dengan data yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif difokuskan pada saat melakukan penelitian langsung di lapangan. (Menurut Sugiyono,2018) Analisis data merupakan sebuah proses mengurutkan secara sistematis dari data yang diperoleh dilapangan, baik berupa hasil wawancara, kemudian dokumentasi lainnya dengan mengurutkan prosesnya sehingga saling berkaitan dari awal hingga akhir hasil penelitian. (Menurut Moleong,2017) Analisis data merupakan sebuah proses mengurutkan sesuai kategori sehingga dapat ditemukan tema ataupun menjadi hasil yang runtut dan kemudian dapat diambil kesimpulan akhirnya.

Reduksi Data: merupakan Proses awal dalam melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif. Reduksi data yaitu dengan melakukan telaah data, hal apa saja yang menjadi penting untuk dimasukkan dan lebih memfokuskan dari hasil analisis data sehingga dapat memudahkan pengumpulan data kedepannya. (Menurut Sugiyono,2018) Reduksi data adalah pengumpulan data yang difokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan topik penelitian, dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan mepermudah melakukan pengumpulan data di tahap selanjutnya. Pada reduksi data menjadi penting untuk dapat berpikir kritis yang memerlukan konsentrasi tinggi dan perlu adanya pemahaman terkait data yang dikumpulkan.

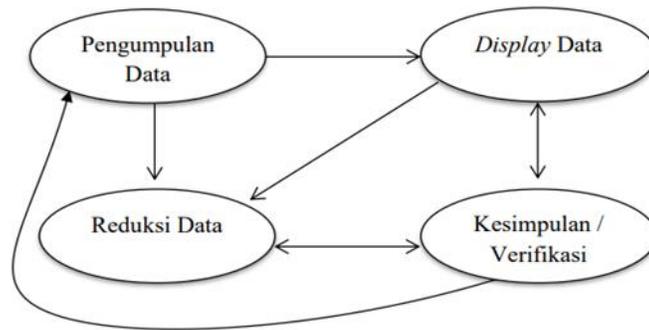
Penyajian Data: penyajian data dalam penelitian kualitatif yaitu dalam bentuk teks atau tulisan berupa uraian singkat penjelasan terkait dengan penelitian. Adanya penyajian data ini dibuat untuk dapat memudahkan dalam memahami proses analisis data. Penyajian data tidak hanya terbatas dalam bentuk teks atau tulisan namun juga bisa berupa tabel, grafik, diagram dan lainnya. Melalui Penyajian data dalam penelitian kualitatif, maka data akan tersusun secara runtut sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca (Menurut Sugiyono, 2018)

Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan: Langkah ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, yaitu dengan melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil analisis data. Dalam tahap ini akan menjawab bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. (Menurut Sugiyono, 2018), Penarikan kesimpulan dapat menjawab adanya rumusan masalah yang telah ditentukan

sejak awal, yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Adanya penarikan kesimpulan ini juga akan menjadikan sebuah perbedaan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sebelumnya, karena adanya perbedaan pendapat ataupun pemikiran masing-masing orang.

Gambar 1.1

Model Analisis Data



Sumber: Sugiyono, 2018